



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KETENAGAKERJAAN



RENCANA KERJA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat-Nya Ranwal Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 dapat tersusun.

Kedudukan Ranwal Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan Pedoman penyusunan Anggaran di Tahun 2025.

Selesaiannya penyusunan Ranwal Rencana Perangkat daerah ini, tidak terlepas dari arahan, masukan, kerja sama dan dukungan dari :

1. Tim Penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
2. Bidang Koordinasi Baperlitbang Kabupaten Klungkung.
3. Staf di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
4. Pihak-pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian Ranwal Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu dan atas bantuan serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Klungkung,



I. Wayan Sumarta, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196509091986021008

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja PD merupakan salah satu dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah yang memuat program kegiatan yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran pembangunan dan dibuat setiap tahun. Penyusunan Renja dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renja PD sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi enam tahapan yaitu a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan, d) pelaksanaan forum perangkat daerah, e) perumusan rancangan akhir; dan f) penetapan.

Renja PD disusun berpedoman pada Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kerthi . Untuk mewujudkan tema tersebut dijabarkan melalui prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ini selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Adapun prioritas daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.
2. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun,

berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Maka penyusunan Renja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya.. Selanjutnya berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja PD tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja bertujuan untuk mengoptimisasi pencapaian sasaran Renstra PD. Penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan hasil evaluasi yang memuat identifikasi permasalahan, isu strategis dan rekomendasi tindak lanjut untuk memecahkan masalah.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Renja PD berfungsi menjabarkan Renstra PD ke dalam rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, dan program kegiatan prioritas Perangkat Daerah. Selain itu penyusunan renja PD memerlukan masukan dari stakeholders melalui forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang. Pelaksanaan Forum Perangkat daerah bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal Renja PD secara partisipatif dari stakeholders meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

Renja PD ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah ditetapkannya RKPD dengan Peraturan Bupati. Penetapan ini menjadikan Renja PD memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan pedoman bagi penyusunan dokumen penganggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2022 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026
- 6) Surat Edaran Bupati Klungkung Nomor : Nomor : 102/2024, Tanggal 6 Pebruari 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah untuk :

- a. menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Disnaker Tahun Anggaran 2025.
- b. menyediakan tolak ukur penilaian kinerja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah :

- a. Untuk merumuskan program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan target kerjanya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disnaker Kabupaten Klungkung selama tahun 2025 dan sejalan dengan target dan prioritas daerah.

- b. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Untuk menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Disnaker Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN terdiri dari :
 - a. Latar belakang (berisi tentang pengertian renja, proses penyusunan, keterkaitan dengan dokumen RKPD, renstra),
 - b. Landasan hukum (menyajikan peraturan yang menjadi acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD)
 - c. Maksud dan tujuan,
 - d. Struktur Organisasi, dan
 - e. Sistematika Penulisan
2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU terdiri dari :
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra (realisasi program/keg, factor penghambat, implikasinya terhadap target akhir renstra, kebijakan/tindakan yg perlu diambil.
 - b. Analisis kinerja Pelayanan perangkat Daerah (menyajikan SPM, NSPK atau IKU).
 - c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - d. Review terhadap Ranwal RKPD
3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD terdiri dari :
 - a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - b. Tujuan dan sasaran renja
 - c. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (menjelaskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas PD dan targetnya yg terkait prioritas daerah, factor yg menjadi bahan pertimbangan, dan rumusan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak sesuai dengan ranwal)
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan PD
 - e. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (jumlah, lokasi/sasaran, indikaotr dan target) dan pagu indikator yang dibutuhkan.
4. BAB IV PENUTUP yang berisikan tentang catatan penting yg perlu mendapat perhatian baik dlm rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran dan kaidah-kaidah pelaksanaan.
5. Lampiran-lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISNAKER TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD SKPD yang bersangkutan. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2023 sesuai bidang urusan pemerintahan daerah yaitu bidang urusan wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang industry dan transmigrasi didukung 5 program, 12 Kegiatan dan 16 Sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Disnaker Kabupaten Klungkung sampai dengan triwulan IV tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Sirenbangda terlampir.

Tabel 2.1
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Reastra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja PD Tahun (2023)		Realisasi Renja PD tahun (2023)		Tingkat Realisasi (%)		K	Rp	K	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp
1		3	Rp	Rp	6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																		
1.2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi (Indek)	338,811,205.00	3,338,600,030.00	31,00	3,674,253,925.00	31,00	3,338,600,030.00	31,00	1.044729106	31,00		31,00	7,677,200,060.00	31,00	1936746526104%			
1.2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi (Pain)	23,214,650.00	10,099,200.00	100%	8,361,200.00	100%	10,099,200.00	100%	1.2078649	100%		100%	20,198,400.00	100%	7197265621%			
1.2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terturunnya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tepat	13,765,450.00	6,809,500.00	15,00	4,718,400.00	15,00	6,809,500.00	15,00	1.443179899	15,00		15,00	13,619,000.00	15,00	4572185144%			
2.2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terturunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (Laporan)	852,600.00	3,289,700.00	32	3,642,800.00	32	3,289,700.00	32	0.903069068	32		32	6,579,400.00	32	1765420090%			
2.2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi (Pain)	7,483,570,768.00	3,428,719,168.00	100,00	3,345,281,129.00	100,00	3,428,719,168.00	100,00	1.024942019	100,00		100,00	6,857,438,336.00	100,00	2454372857002%			

3.2.07.012.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN (%)		3.380.167.076,00	24 Orang	3.299.800.039,00	24 Orang	3.380.167.076,00	24 Orang	1,02	24 Orang		24 Orang	6.760.334.152,00	24 Orang	1006013419202
4.2.07.012.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Teraturannya Laporan keuangan bulanan dan semesteran tepat waktu (Laporan)		48.552.092,00	14 Laporan	45.481.090,00	14 Laporan	48.552.092,00	14 Laporan	1,067522612	14 Laporan		14 Laporan	97.104.184,00	14 Laporan	14258527507
3.2.07.012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi (Paik)	21.855.636,00	87.567.268,00	100,00 %	86.861.198,00	100,00 %	87.567.268,00	100,00 %	1,01	100,00 %		100,00 %	175.134.536,00	100,00 %	28385137101
5.2.07.012.05.03	Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pemenuhan layanan administrasi kepegawaian (Pain)		87.567.268,00	12 Dokumen	86.861.198,00	12 Dokumen	87.567.268,00	12 Dokumen	1,008128716	12 Dokumen		12 Dokumen	175.134.536,00	12 Dokumen	26199573501
4.2.07.012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi (Paik)	613.170.151,00	312.214.394,00	100,00 %	233.750.408,00	100,00 %	312.214.394,00	100,00 %	1,34	100,00 %		100,00 %	624.428.788,00	100,00 %	147134934834
6.2.07.012.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor (%)		310.819.794,00	84,00	231.128.608,00	84,00	310.819.794,00	84,00	1,344791528	84,00		84,00	621.639.588,00	84,00	85276861734
7.2.07.012.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Jasa Surat Menyurat (Pezren)		1.394.600,00	4 Dokumen	2.621.800,00	4 Dokumen	1.394.600,00	4 Dokumen	0,53	4 Dokumen		4 Dokumen	2.789.200,00	4 Dokumen	541100053
2.2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	Persentase Pekerja Yang Terzertifikasi sesuai Jabat Denc (Pozren)	2.642.127.472,03	472.056.790,00	10,36 %	618.030.600,00	10,36 %	472.056.790,00	10,36 %	0,763808119	10,36 %		10,36 %	944.113.580,00	10,36 %	420427165279

5.2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Perrentare Pelatihan Yang Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan	978,509,859.00	44.292.750,00	12%	92,890,850.00	12%	44.292.750,00	12%	0.48	12%	88,585,500.00	12%	115998620951%		
8.2.07.03.2.01.01	Prasar Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbaris	978,509,859.00	44.292.750,00	40 Orang	92,890,850.00	40 Orang	44.292.750,00	40 Orang	0.476825758	40 Orang	40 Orang	40 Orang	88,585,500.00	40 Orang	115998620951%
6.2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perrentare Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perrentare Fasilitas	1,663,617,613.00	427.764.040,00	40%	525,139,750.00	40%	427.764.040,00	40%	0.31	40%	40%	40%	855,528,080.00	40%	304428544381%
9.2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja	1,663,617,613.00	427.764.040,00	35 Orang	525,139,750.00	35 Orang	427.764.040,00	35 Orang	0.814571816	35 Orang	35 Orang	35 Orang	855,528,080.00	35 Orang	304428544381%
3.2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Terserapnya Tenaga kerja (Porren)	4,596,544,669.00	1,576.240.875,00	60,90%	909,812,159.00	60,90%	1,576.240.875,00	60,90%	1.73	60,90%	60,90%	60,90%	3,192,481,750.00	60,90%	86883857973%
7.2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Terserap Melalui Peta Padat Karya dan WUB yang memiliki	4,322,169,969.00	1,533.525.425,00	44 Orang	880,197,059.00	44 Orang	1,533.525.425,00	44 Orang	1.742252385	44 Orang	44 Orang	44 Orang	3,067,050,850.00	44 Orang	826941787974%
10.2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	4,322,169,969.00	1,533.525.425,00	44 Orang	880,197,059.00	44 Orang	1,533.525.425,00	44 Orang	1.74	44 Orang	44 Orang	44 Orang	3,067,050,850.00	44 Orang	826941787974%
8.2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Parar Kerja	Perrentare Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Perusahaan dan Jumlah	149,794,450.00	30.755.000,00	61%	17,919,250.00	61%	30.755.000,00	61%	1.71631067	61%	61%	61%	61,510,000.00	61%	22922370172%

11.2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Parar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Parar Kerja Melalui	149794450	30.755.000,00	200 Orang	17.919.250,00	200 Orang	30.755.000,00	200 Orang	1,72	200 Orang	200 Orang	61.510.000,00	200 Orang	22922370172%
9.2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lakari Kerja dalam 1(ratu) Daerah Kabupaten/Kota/Koordinari dan	Perrentare TKA dan TKI pendamping (perren)	91,539,750.00	11.960.450,00	60%	11,695,850.00	60%	11.960.450,00	60%	1.022623409	60%	60%	23,920,900.00	60%	12715650102%
12.2.07.04.2.05.01	Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lakari Kerja dalam 1(ratu)	Perrentare TKA dengan TKI Pendamping (perren)	91,539,750.00	11.960.450,00	60%	11,695,850.00	60%	11.960.450,00	60%	1,02	60%	60%	23,920,900.00	60%	12715650102%
4.2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perrentare Perumahan yang Menorapkan Norma dan Peraturan Perundang-Perundangan	321,822,710.00	56.910.000,00	97,60%	72,732,000.00	97,60%	56.910.000,00	97,60%	0.78246164	97,60%	97,60%	113,820,000.00	97,60%	50837471078%
10.2.07.05.2.01	Pengarahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Berusaha dalam	Perrentare Perusahaan Yang Memilii Peraturan Perusahaan dan Perrentare Keperrentarean Perusahaan dalam Berusaha	160,724,500.00	34.941.000,00	5%	40,047,800.00	5%	34.941.000,00	5%	0,87	5%	5%	69,882,000.00	5%	27065430087%
13.2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjarenta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar	160,724,500.00	34.941.000,00	12 Laporan	40,047,800.00	12 Laporan	34.941.000,00	12 Laporan	0.872482384	12 Laporan	12 Laporan	69,882,000.00	12 Laporan	27065430087%
11.2.07.05.2.02	Pencapaian dan Penyelidikan Perrellirihan Hubungan Industrial, Magak Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	perrentare perurahan yang membentuk LKS Bipartit dan perrentare perrellirihan hubungan industrial yang	16,109,210.00	21.969.000,00	100%	32,684,200.00	100%	21.969.000,00	100%	0,67	100%	100%	43,938,000.00	100%	9273141067%

14.2.07.05.2.02.02	Penyelidikan Hubungan Industrial, Masalah Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Penyelidikan yang Terselesaikan (Perkara)		7.205.000,00	2 Perselisihan	10.611.400,00	2 Perselisihan	7.205.000,00	2 Perselisihan	0,67999675	2 Perselisihan		2 Perselisihan	14.410.000,00	2 Perselisihan	2502140068%
15.2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Perangkat Daerah, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non	Jumlah Anggota Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Serikat Pekerja)		14.764.000,00	1 Serikat Pekerja	22.072.800,00	1 Serikat Pekerja	14.764.000,00	1 Serikat Pekerja	0,67	1 Serikat Pekerja		1 Serikat Pekerja	29.528.000,00	1 Serikat Pekerja	5160080067%
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
5.3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kuota transmigrasi yang terpenuhi (KK)	171.191.900,00	9.944.100,00	20%	10.746.500,00	20%	9.944.100,00	20%	9.944.100,00	20%		20%		20%	19188250040%
12.3.32.03.2.01	Penataan Penyebaran Penduduk yang Berasal dari 1	Jumlah Animo Transmigrasi (Person)	171.191.900,00	9.944.100,00	20%	10.746.500,00	20%	9.944.100,00	20%	9.944.100,00	20%		20%		20%	19188250100%
16.3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	171.191.900,00	9.944.100,00	20%	10.746.500,00	20%	9.944.100,00	20%	9.944.100,00	20%		20%		20%	19188250100%

Konsistensi penyusunan Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan pelaksanaannya (DPA OPD) Tahun 2023 terbangun cukup baik yang terlihat dari kesesuaian program dan kegiatan yang dirancang dari Renstra, Renja dan DPA OPD. Berdasarkan hasil evaluasi renja triwulan IV tahun 2023, total rata rata capaian kinerja dari seluruh program adalah 100% dengan predikat kinerja Baik (B) sedangkan tingkat serapan anggaran sebesar 95,54 % dengan predikat kinerja Baik (tabel sirebangda terlampir). Adapun capaian target kinerja program/ kegiatan dan penyerapan dana renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 diuraikan sesuai bidang urusan, adalah sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Ketenagakerjaan

Dengan didukung 4 program, total rata rata capaian kinerja dan anggaran program bidang urusan ketenagakerjaan yaitu sebesar 88,74% dengan predikat Baik (B). Program bidang urusan ketenagakerjaan yaitu antara lain:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotak, dengan total rata rata capaian anggaran dan Kinerja dari seluruh kegiatan yaitu 98,38% dan 232,52% berpredikat kinerja Sangat Baik (SB).
- 2) Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan total rata rata capaian anggaran sebesar 96,41% dan Kinerja dari seluruh kegiatan yaitu 103,60% dan 100% berpredikat kinerja Baik (B).
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja, total rata rata capaian anggaran sebesar 45,79 % dan kinerja dari seluruh kegiatan adalah sebesar 100% dengan predikat kinerja Baik (B).
- 4) Program Hubungan Industrial, total rata rata capaian anggaran sebesar 71,70 dan kinerja dari seluruh kegiatan adalah sebesar 100 % dengan predikat kinerja Baik (B).

2. Bidang Ketransmigrasian

Bidang Urusan Ketransmigrasian pada Renja Disnaker Tahun 2023 didukung (1) program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Total rata rata capaian kinerja sebesar 100 % dan anggaran program bidang urusan ketransmigrasian adalah sebesar 87,02 %

3. Bidang Urusan Sumber Daya Energi dan Mineral

Badan Urusan Sumber daya Energi dan Mineral dengan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak ada dikarenakan belum ditemukannya panas bumi di Kabupaten Klungkung.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Ketenagakerjaan ingin mewujudkan:

Wirausaha mandiri serta Tenaga kerja yang berdaya saing dan produktif baik berbasis kompetensi kerja maupun keterampilan berbasis masyarakat serta memperoleh perlindungan secara maksimal bagi kesejahteraannya secara lahir dan bathin, sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan serapan tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan khususnya di Kabupaten Klungkung.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas maka ditetapkan tujuan jangka menengah Disnaker Kabupaten Klungkung yaitu (1) meningkatnya daya saing masyarakat dengan Sasaran Paritas daya Beli. Upaya pencapaian tujuan tersebut dijabarkan melalui sasaran OPD yakni (1) Terserapnya angkatan kerja dengan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (2) Meningkatnya Hubungan Harmonisasi antar Pekerja /Buruh dengan Perusahaan dengan Indikator Persentase Tingkat Produktivitas Pekerja dari 2 Sasaran tersebut Dijabarkan dengan 6 Program program perangkat Daerah dengan indikator yang teukur seperti : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotak, 2. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, 3. Program Penempatan Tenaga Kerja, 4. Program Hubungan Industrial, dan yang ke 6. program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tujuan dan sasara jangka menengah pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Analisis
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	-	77,75 %	79,55 %	42,51 %	42,51 %	42,51 %	79,81 %	79,88 %	42,51 %	42,51 %	
2	Jumlah perselisihan Hubungan Industrial	-	-	37,90%	42,51%	5%	5%	5%	28,47%	36,47%	2 Perselisihan	1 Perselisihan	

Sumber: Rensra Disnaker Kab. Klungkung 2024-2026

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi social. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan Pendidikan dan pekerjaan berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari hari, sedangkan dimensi social berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan (1) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (2) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; (3) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dengan memberdayakan tenaga kerja, membuka peluang serapan tenaga kerja sehingga dapat mencapai tujuan dalam upaya menurunkan pengangguran yang berarti pula mengurangi kemiskinan. Melalui program/ kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung berupaya memberdayakan tenaga kerja di daerah baik yang menganggur, setengah menganggur maupun yang bekerja. Seperti memberikan pelatihan/ pembekalan bagi pencari kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan serta sertifikasi kompetensi bagi yang sudah terlatih agar lebih mampu bersaing di era globalisasi, padat karya dan pembentukan wirausaha muda yang mandiri, pengembangan TKI pendamping melalui *'transfer knowledge'* dan pengendalian TKA. Memfasilitasi pemberi kerja dengan pencari kerja melalui bursa tenaga kerja, memfasilitasi hubungan industrial guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kerja. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Jumlah pengangguran akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana partisipasi angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, mereka terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Perbandingan penduduk yang tergolong angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dikenal dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan baik di daerah pedesaan dan perkotaan. Apabila angka TPAK kecil maka dapat diperkirakan bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya cukup banyak. TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu wilayah/ daerah. Karena semakin tinggi TPAK maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di daerah tersebut. TPAK yang tinggi juga menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, besarnya kesempatan kerja tentunya dapat menurunkan pengangguran.

Tabel 2.3
BPS Kabupaten Klungkung

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	106.852	104.268	115.235	131.562
Bekerja	101.058	98.691	112.973	129.864
Pengangguran	5.794	5.577	2.262	1.698
Bukan angkatan kerja	35.098	38.904	29.154	33.135
Jumlah Penduduk Usia kerja	141.450	143.172	144.389	164.697
TKK	94.58	94.65	98.04	99,36
TPAK	75.27	72.83	79.81	79,88
TPT	5.42	5.35	1.96	1,27

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2023

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Sistem informasi Tenaga Kerja belum terbangun sebagai landasan kebijakan Tenaga Kerja;
- 2) Informasi pasar tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah masih kurang update;
- 3) Masih terbatasnya fasilitasi bursa kerja;
- 4) Masih lemahnya link and match antara lembaga pendidikan dengan kualifikasi kebutuhan dunia kerja;
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi Tenaga Kerja;
- 6) Rendahnya minat kewirausahaan guna penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja mandiri;
- 7) Rendahnya kesadaran dan pemahaman tenaga kerja tentang pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan;
- 8) Masih terbatasnya jaringan kerja dengan Lembaga Diklat dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja;
- 9) Rendahnya minat kewirausahaan di kalangan generasi muda;
- 10) Rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif perusahaan menerapkan norma K3;

- 11) Rendahnya kesadaran perusahaan mematuhi perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja;
- 12) Lemahnya kapasitas pengawasan penjaminan sosial tenaga kerja;
- 13) Sistem imbalan yang relatif kompleks dengan banyak variabel tunjangan yang masing-masing mempunyai potensi menjadi sumber perselisihan;
- 14) Banyaknya pekerja berdasarkan kontrak kerja atau tenaga kerja *outsourcing* yang tidak memberikan kepastian untuk dapat terus bekerja;
- 15) Tidak seimbang pertambahan pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia;
- 16) Masih lemahnya pemetaan kebutuhan calon tenaga kerja/tenaga kerja terhadap diklat dan pemagangan

Bidang Transmigrasi

- 1) Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Transmigrasi, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
- 2) Lemahnya sosialisasi terkait ketransmigrasian, baik transmigrasi daerah pengiriman maupun daerah penerima;
- 3) Belum adanya perencanaan yang matang dari pemerintah daerah penerima terhadap kehadiran transmigran;
- 4) Animo masyarakat bertransmigrasi bersifat musiman.

1. Isu strategis urusan ketenagakerjaan meliputi:

- Pengangguran Terbuka Cukup Tinggi
- Kompetensi Tenaga Kerja rendah
- Kesempatan Kerja Kurang

2. Isu strategis urusan transmigrasi meliputi:

Kesempatan kerja yang kurang menimbulkan Peningkatan minat bertransmigrasi melalui pengembangan potensi ekonomi daerah tujuan transmigrasi. Adanya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang disebabkan oleh keterbatasan lahan perkebunan.

2.4 Reviu terhadap Ranwal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan Renja dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS yang ditetapkan. Reviu terhadap rumusan rencana program dan kegiatan serta anggaran Renja Disnaker Tahun 2025 sudah sesuai dengan Ranwal RKPD, walaupun adanya perubahan

indikator kinerja dan pagu anggaran di beberapa program/ kegiatan, berdasarkan analisa kebutuhan. Reviu terhadap rancangan awal RKPD Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025 disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini :

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	DINAS KETENAGAKERJAAN					9,488,999,706.00					7,701,358,267.00	
2	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9,415,407,306.00					7,627,765,867.00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				9,415,407,306.00					7,627,765,867.00		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72 Indeks	4,584,281,406.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72 Indeks	4,592,186,187.00		
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 Persen	24,176,680.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 Persen	19,152,080.00	Tersedianya dokumen Renja, DPA, RKA dan Evaluasi Renja (induk dan perubahan) (CIK, Pemantauan Rencana Aksi, LKPJ, Evaluasi Renja, LKJIP dan LPPD)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tepat waktu (Dokumen)	9 Dokumen	10,216,480.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tepat waktu (Dokumen)	9 Dokumen	8,980,080.00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (Laporan)	32 Laporan	13,960,200.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu (Laporan)	32 Laporan	10,172,000.00		

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	4,051,247,731.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	4,051,247,731.00	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan tersedianya laporan keuangan fungsioal
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3,993,411,327.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3,993,411,327.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	57,836,404.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	57,836,404.00	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tingkat Disiplin Aparatur	100 Persen	119,331,416.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tingkat Disiplin Aparatur	100 Persen	117,932,336.00	tersusunnya adminstrasi kepegawaian dan pembayaran jasa tenaga kontrak
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	119,331,416.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	117,932,336.00	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor	100 Persen	90,567,440.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor	100 Persen	94,767,400.00	Belanja Jasa, Instalasi listrik, Penyediaan barang Cetak, Arsip
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,042,800.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,042,800.00	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	85,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	88,500,000.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,499,900.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3,445,800.00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	3,024,740.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1,778,800.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Peme nuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	161,618,136.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Peme nuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	161,578,936.00	Belanja rutin (listrik, telkom air)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47,509,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	47,509,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114,109,136.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114,069,936.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	100 Persen	137,340,003.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	100 Persen	147,507,704.00	Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dan pemeliharaan rehab gedung kantor
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	76,870,003.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	87,037,704.00	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10,470,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10,470,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000.00	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi	85 Orang	936,896,260.00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi	85 Orang	912,756,040.00	
2	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi	40 Orang	137,069,740.00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi	40 Orang	213,079,240.00	Proses pendidikan dan pelatihan keterampilan
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 Orang	137,069,740.00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 Orang	213,079,240.00	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	45 Orang	799,826,520.00	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	45 Orang	699,676,800.00	Pengukuran kompetensi tenaga kerja

	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	45 Dokumen	799,826,520.00	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	45 Dokumen	699,676,800.00	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesempatan Kerja	20 Kesempatan Kerja	3,769,459,340.00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesempatan Kerja	20 Kesempatan Kerja	1,998,053,540.00	
2	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja memiliki perijinan (Orang)	20 Kerjasama	3,769,459,340.00	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja memiliki perijinan (Orang)	20 Kerjasama	1,998,053,540.00	Pelayanan antar kerja berupa padat karya sosialisasi layanan pekerja/bursa kerja, IMTA
	Pelayanan antar Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500 Orang	3,769,459,340.00	Pelayanan antar Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500 Orang	1,998,053,540.00	
2	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang memenuhi Sarana Hubungan Industrial dan Hak - Hak Pekerja	5 Perusahaan	124,770,300.00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang memenuhi Sarana Hubungan Industrial dan Hak - Hak Pekerja	5 Perusahaan	124,770,100.00	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)	5 Perusahaan	75,662,100.00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)	5 Perusahaan	75,661,900.00	Pendataan informasi dan jaminan sosial

	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	75,662,100.00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	75,661,900.00	
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perselisihan Termediasi	100 Persen	49,108,200.00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perselisihan Termediasi	100 Persen	49,108,200.00	Penyelesaian perselisihan antar pekerja perusahaan dan keanggotaan organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	2 Perkara	19,408,500.00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	2 Perkara	19,408,500.00	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	29,699,700.00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	29,699,700.00	

	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				73,592,400.00					73,592,400.00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				73,592,400.00					73,592,400.00	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAS	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Animo Transmigrasi	20 KK	73,592,400.00	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAS	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Animo Transmigrasi	20 KK	73,592,400.00	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi	20 Kali	73,592,400.00	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi	20 Kali	73,592,400.00	Pembangunan Transmigrasi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	12 Laporan	73,592,400.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	12 Laporan	73,592,400.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2025, Dinas Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah secara virtual yang bertujuan untuk menggali usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja. Namun demikian tidak terdapat usulan penambahan kegiatan dari peserta forum.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Bidang Ketenagakerjaan

Delapan arah kebijakan Renstra Kemnaker pada 2022-2025. Rinciannya adalah sebagai berikut ini:

- 1) Mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (pendidikan vokasi) dan soft skills.
- 3) Mengembangkan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah.
- 4) Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi "demand" tenaga kerja.
- 5) Memperkuat relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI).
- 6) Meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri.
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.
- 8) Meningkatkan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik Peningkatan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) secara online.

2. Bidang Transmigrasi

Kebijakan Transmigrasi:

- 1) Menempatkan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai program prioritas nasional/daerah;
- 2) Mendorong peningkatan kemandirian ekonomi di kawasan transmigrasi sesuai prinsip ekonomi hijau;
- 3) Mengembangkan mekanisme (model) introduksi kegiatan ekonomi baru di kawasan transmigrasi;
- 4) Meningkatkan kontribusi perekonomian kawasan transmigrasi terhadap kabupaten/provinsi.
- 5) Mempertegas pembagian peran pemerintah/pemda dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan transmigrasi;
- 6) Meningkatkan konektivitas internal kawasan transmigrasi;
- 7) Meningkatkan konektivitas antara kawasan transmigrasi dan pusat-pusat pelayanan di sekitarnya;
- 8) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur serta aksesibilitas di kawasan transmigrasi.
- 9) Memantapkan basis data calon transmigran minimal hingga tingkat kabupaten;
- 10) Memantapkan kriteria, target, dan proses seleksi calon transmigran;
- 11) Meningkatkan penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan transmigrasi;
- 12) Mendorong proses integrasi sosial budaya baik antar sesama transmigran maupun antara transmigran dengan penduduk setempat.
- 13) Meningkatkan sinergi pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan transmigrasi;
- 14) Membangun kerjasama antara daerah (terutama antar provinsi) yang efisien dan efektif dalam mengembangkan kawasan transmigrasi;
- 15) Mengembangkan program insentif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembinaan berkelanjutan untuk membangun kawasan transmigrasi;
- 16) Meningkatkan efektifitas delivery program untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan merujuk pada skema desentralisasi.

- 17) Mengembangkan model promosi yang efektif dan efisien untuk kawasan transmigrasi prioritas dan kawasan transmigrasi baru;
- 18) Memantapkan mekanisme penyediaan lahan untuk kawasan transmigrasi terutama pada wilayah dengan sistem tenurial yang khas.

Rensra PD Provinsi Bali disusun berpedoman pada Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025- 2026 mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kerthi . Untuk mewujudkan tema tersebut dijabarkan melalui prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ini selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Adapun prioritas daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

maka penyusunan Rensra Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2024 -2026 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya.. Selanjutnya berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja PD tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja bertujuan untuk mengoptimalisasi pencapaian sasaran Renstra PD.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)

Adapun Maksud Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025-2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk:

- Menjabarkan tujuan dan sasaran ke dalam rencana program/kegiatan periode 3 (tiga) tahun yang bersifat indikatif;
- Menjabarkan strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ESDM.

- Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan program/kegiatan baik di tingkat Pusat maupun di Daerah, serta aspirasi masyarakat dan Tujuan: Tujuan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025-2026 adalah:

- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sekaligus acuan penentuan pilihan program/kegiatan tahunan;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- Menjamin keberlangsungan program/kegiatan ketenagakerjaan, ESDM, dan transmigrasi berjalan secara terencana, terpola dan berkelanjutan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025-2026 akan memudahkan perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk program/kegiatan beserta kerangka pendanaannya, sehingga Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lebih baik, dan mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance).

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Tujuan Pemerintah Daerah Tujuan Perangkat Daerah

1. Menurunkan tingkat Kemiskinan Krama Bali; Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan
2. yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah
Indikator: 1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
- 3 . Persentase EBT 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim;

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang ditetapkan yaitu sebagai berikut: Sasaran Pemerintah Daerah Sasaran Perangkat Daerah

1. Menurunnya pengangguran
2. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
3. Meningkatnya penggunaan energi bersih

Sasaran perangkat daerah yakni

1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Daya
3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja
4. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama/IKU Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

telah mengupayakan melalui beberapa sasaran beserta indikatornya sebagai alat ukur/untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Indikator-indikator sasaran tersebut ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama/IKU Perangkat Daerah. Ada pun IKU Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang ditetapkan pada tahun 2025-2026 sebagai berikut: Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025-2026

NO	Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target	Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
1	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	94,63%	97,43%	97,99%
2	Persentase tenaga kerja yang berdaya saing	56,71%	86%	89%

Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025-2026

68 7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci/IKK

Indikator Kinerja Kunci/IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan dengan menilai capaian IKK. Ada pun IKK Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang ditetapkan pada tahun 2025-2026 sebagai berikut: Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025-2026

No	Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target	Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun (2026)
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100%	100%	100%
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,43%	0,45%	0,48%
3	Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	42.87%	43.37%	43.87%
4	Persentase Pemanfaatan EBT	2,27%	8.45%	10.65%

Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025-2026

69 3 Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit,Struktur Skala Upah,dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

48,05%	48,15%	48,35%	48,50%	48,50%
--------	--------	--------	--------	--------

4 Persentase tenaga

kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 0,61% 0,65% 0,70% 0,75% 0,75% 5 Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Desa Yang Teraliri Listrik 100% 100% 100% 100% 100% Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, serta diatur dengan Peraturan Bupati Klungkung nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan tiga bidang urusan pemerintahan yaitu bidang urusan wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan, bidang urusan pilihan Ketenagakerjaan, transmigrasi dan ESDM. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Disnaker harus sejalan dengan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kerthi, dan telah dijabarkan dalam Renstra PD. Disnaker memiliki tugas dan fungsi yang mendukung.

Berdasarkan hal tersebut serta sesuai tugas dan fungsinya, Disnaker menetapkan satu tujuan dengan dua sasaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Daya Beli	5 %			
				Terserapnya angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	42,51 %
				Meningkatnya Hubungan Harmonisasi antar Pekerja /Buruh dengan Perusahaan	Jumlah Perselisihan hubungan Industrial	1 Perselisihan

3.3 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun 2025 Disnaker Kabupaten Klungkung merencanakan 5 (lima) program dan 13 (dua belas) kegiatan dan 23 (enam belas) sub kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dirancang diarahkan untuk mencapai sasaran SKPD sehingga dapat menjawab isu strategis pada Disnaker Kabupaten Klungkung dengan arah kebijakan yang difokuskan pada:

1. Bantuan Pelatihan dan Penyaluran Tenaga Kerja Ke Luar Negeri.
2. Pelatihan bagi Wira Usaha Baru
3. Padat Karya
4. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.
5. Sertifikasi Tenaga Kerja.
6. Peningkatan pembinaan transmigrasi dan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi;
7. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim tenaga kerja;

Tabel T-C 3.2

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
- KAB. KLUNGKUNG TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETENAGAKERJAAN						8.041.958.267,00							7.354.407.444,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.968.365.867,00							7.274.932.244,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						7.968.365.867,00							7.274.932.244,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	72 Indeks			72 Indeks	4.932.786.187,00						72 Indeks	4.188.214.443,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti</i>	100 Persen			100 Persen	19.152.080,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	100 Persen	24.152.521,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	9 Dokumen			9 Dokumen	8.980.080,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	9 Dokumen	10.191.978,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	32 Laporan			32 Laporan	10.172.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	32 Laporan	13.960.543,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Terpenuhinya laporan Bulanan / Triulanana</i>	100 Persen			100 Persen	4.391.847.731,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.472.287.928,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	24 Orang/bulan			24 Orang/bulan	4.334.011.327,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 Orang/bulan	3.409.220.481,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	14 Laporan			14 Laporan	57.836.404,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Laporan	63.067.447,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Tingkat Disiplin Aparatur</i>	100 Persen			100 Persen	117.932.336,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	166.112.197,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	12 Dokumen			12 Dokumen	117.932.336,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	166.112.197,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor	100 Persen			100 Persen	94.767.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	99.659.988,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1.042.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	2.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	88.500.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket	85.459.988,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			3 Paket	3.445.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	1.700.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			4 Dokumen	1.778.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			100 Persen	161.578.936,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	100 Persen	160.018.736,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	47.509.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	12 Laporan	45.909.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan			12 Laporan	114.069.936,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	-	12 Laporan	114.109.736,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik</i>	100 Persen			100 Persen	147.507.704,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	265.983.073,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	18 Unit			18 Unit	87.037.704,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	18 Unit	103.493.353,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	13 Unit			15 Unit	10.470.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	13 Unit	67.489.720,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Unit	95.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi</i>	85 Orang			85 Orang	912.756.040,00						85 Orang	910.532.301,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi	20 Orang			40 Orang	213.079.240,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan per ekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	20 Orang	137.069.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 Orang			40 Orang	213.079.240,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan per ekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	20 Orang	137.069.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	50 Orang			45 Orang	699.676.800,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan per ekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-	50 Orang	773.462.401,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 Dokumen			45 Dokumen	699.676.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan per ekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-	40 Dokumen	773.462.401,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Kesempatan Kerja	20 Kesempatan Kerja			20 Kesempatan Kerja	1.998.053.540,00						20 Kesempatan Kerja	2.039.459.500,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja	241 Orang			20 Kerjasama	1.998.053.540,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan per-ekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pencari Kerja	241 Orang	2.039.459.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	176 Orang			500 Orang	1.998.053.540,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan per-ekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pencari Kerja	176 Orang	2.039.459.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Perusahaan yang memenuhi Sarana Hubungan Industrial dan Hak - Hak Pekerja	5 Perusahaan			5 Perusahaan	124.770.100,00						5 Perusahaan	136.726.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)	5 Persen			5 Perusahaan	75.661.900,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan per-ekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-	5 Persen	85.776.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	12 Laporan			12 Laporan	75.661.900,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan per ekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-	12 Laporan	85.776.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perselisihan Termediasi</i>	100 Persen			100 Persen	49.108.200,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perselisihan yang dimediasi	100 Persen	50.950.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	2 Perkara			2 Perkara	19.408.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perselisihan yang dimediasi	2 Perkara	19.450.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja			1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	29.699.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Perselisihan yang termediasi	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	31.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						73.592.400,00							79.475.200,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						73.592.400,00							79.475.200,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Jumlah Animo Transmigrasi</i>	20 KK			20 KK	73.592.400,00						20 KK	79.475.200,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi</i>	20 Persen			20 Kali	73.592.400,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemerantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Persebaran Penduduk	20 Persen	79.475.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	12 Laporan			12 Laporan	73.592.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saling Sumber Daya Manusia	Persebaran Penduduk	12 Laporan	79.475.200,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
J U M L A H								8.041.958.267,00							7.354.407.444,00	

BAB IV

PENUTUP

A. Catatan Penting

Renja Disnaker Kabupaten Klungkung tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 dilingkup Disnaker Kabupaten Klungkung. Renja Disnaker disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti: evaluasi renja tahun sebelumnya, ketersediaan anggaran, program-program prioritas yang mendukung : **MENGUATKAN PEREKONOMIAN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN DENGAN KONSEP KEMITRAAN**. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu **Menurunkan Angka Kemiskinan dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi**.

B. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disnaker Kabupaten Klungkung yang meliputi tiga bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar **ketenagakerjaan**, serta urusan pilihan **Transmigrasi** dan **ESDM**, ditetapkan Tujuan 1 yaitu: meningkatnya daya saing masyarakat dengan indicator Paritas daya beli dengan sasaran sasaran 1. Terserapnya angkatan kerja dengan indicator tingkat partisipasi angkatan kerja dan 2. Meningkatnya Hubungan Harmonisasi antar Pekerja /Buruh dengan Perusahaan dengan indikator Persentase Tingkat Produktivitas Pekerja.

C. Rencana Tindaklanjut

Rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan oleh Disnaker Kabupaten Klungkung yang akan ditetapkan dengan, melalui 5 program, 13 Kegiatan serta 23 Sub kegiatan. Dengan mengoptimalkan dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh Disnaker Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.





BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dijadikan pedoman dalam:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung untuk periode Tahun 2025; dan
- b. penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Renja sekretariat daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Renja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Renja inspektorat daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Renja badan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Renja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Renja badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Renja badan penanggulangan bencana daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Renja badan kesatuan bangsa dan politik Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Renja badan riset dan inovasi daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. Renja dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. Renja dinas kesehatan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- l. Renja dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Renja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Renja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Renja dinas kearsipan dan perpustakaan daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Renja dinas kebudayaan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Renja dinas ketahanan pangan dan perikanan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Renja dinas komunikasi dan informatika Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Renja dinas perhubungan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Renja dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Renja dinas lingkungan hidup dan pertanahan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Renja dinas pariwisata Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Renja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Renja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Renja dinas ketenagakerjaan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Renja dinas pertanian Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Renja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Renja kecamatan nusa penida Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Renja kecamatan dawan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- dd. Renja kecamatan banjarangkan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- ee. Renja kecamatan klungkung Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 9 Agustus 2024
BUPATI KLUNGKUNG,



Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 16